

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



SATUAN KERJA PERAGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN KAPUAS HULU

Alamat: Jalan Merdeka No. 06 Telp. (0567) 21131
Putussibau

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Rencana Kerja yang telah disusun ini sebagai acuan atau bingkai dari rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak terlepas dari Darft / Konsep yang telah disusun dalam RENSTRA Tahun 2016 – 2021 untuk mencapai Visi dan Misi DPMD kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2019 merupakan Renja tahun Kedua setelah SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 56 tahun 2016 tentang SOTK.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini telah mengakomodir Program Prioritas Nasional Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan juga merujuk kepada Renstra DPMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2019 DPMD Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 disertai dengan adanya Penguatan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hal ini mengingat luasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa (278 Desa) serta pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Oktober 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu



Alpiansyah, S.E., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199503 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sitematika	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional	54
3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat daerah.....	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD.....	72
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	73
BAB V PENUTUP	
4.3 Penutup.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Tahun Ketiga dalam pelaksanaan RENSTRA Tahun 2016 – 2021 untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan Renja Tahun 2019 tentunya tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA tahun sebelumnya (2011-2015) yang diawali dari pengamatan lapangan pengkajian data dan informasi dalam pelaksanaan program/kegiatan selama ini baik pelaksanaan program nasional urusan wajib pemerintahan daerah maupun program prioritas utama SKPD yang bersangkutan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2019 selain berorientasi pada tupoksi Dinas juga berorientasi pada keberlanjutan dari hasil yang telah dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan Renstra 2011-2015 dengan lebih mengoptimalkan hasil yang telah dicapai selama ini.

Renja OPD merupakan bagian dari dokumen strategis pelaksanaan perencanaan untuk periode satu tahun, yang akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (RKPD) Tahun 2019 memuat tentang kebijakan program/kegiatan prioritas pembangunan pemberdayaan baik dilaksanakan langsung oleh DPMD Kabupaten Kapuas Hulu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Instrumen kebijakan yang telah tertuang didalam Renja Tahun 2019 ini pada dasarnya bertujuan mengarahkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan agar mencapai sasaran yang diinginkan sejalan dengan Visi, Misi DPMD 2016-2021 dari aspek perencanaan yang diarahkan semaksimal mungkin agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan datang dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun yang akan datang 2016-2021.

Renja OPD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu program/kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja ini diharapkan mampu

merespon kebutuhan masyarakat dan pemerintahan desa kedepannya dalam bingkai sebuah kosep **“Mewujudkan Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD DPMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini, dilandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud Dan Tujuan dari Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai acuan atau bingkai dari

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2019 sebagai bentuk penjabaran lebih luas dari konsep Visi dan Misi Tahun 2016-2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, dengan harapan program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran yang bermanfaat, guna Meningkatkan taraf hidup kelompok sasaran itu sendiri serta dapat menumbuhkan Sumber Daya Manusia yang kreatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Tungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang diuraikan dalam lampiran 2.1 Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan capaian Renstra OPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau realisasi APDB diakhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan berdasarkan Capaian atau Realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Tahun 2017-2018 (tahun berjalan)

Kabupaten Kapuas Hulu

SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2018	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2018			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
		<i>Predikat SAKIP</i>								
	Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1.277.760	1.056.000	160	1.056.000	6.000	1.056.000	2.976.000	2
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan langganan	160.956.080	110.600.000	12	110.600.000	8.966.667	110.600.000	305.800.000	2
	3 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah orang	100.000.000	84.180.000	15	84.180.000	5.612.000	84.180.000	252.540.000	3
	4 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Honor	93.170.000	76.782.000	4	76.782.000	19.095.500	76.782.000	229.546.000	2
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja	18.150.000	15.000.000	3	15.000.000	6.666.667	15.000.000	45.000.000	2

						6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	67.668.930	60.963.000	21	60.963.000	1.705.095	60.963.000	116.353.000	2
						7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	42.492.000	106.370.100	11	106.370.100	2.088.191	106.370.100	152.112.200	4
						8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	47.600.000	23.600.000	20	23.600.000	2.030.000	23.600.000	47.800.000	1
						9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan /Perlengkapan	380.175.950	314.195.000	15	314.195.000	9.580.000	314.195.000	508.395.000	1
						10	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	Jumlah bulan langganan	6.824.400	5.640.000	12	5.640.000	500.000	5.640.000	17.280.000	3
						11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Aparatur	29.872.700	271.570.000	54	271.570.000	3.244.444	271.570.000	534.610.000	18
						12	Rapat-Rapat Koordinasi/KONSultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	876.602.166	724.464.600	164	724.464.600	5.527.261	724.464.600	2.532.713.400	3
						13	Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	948.977.590	784.279.000	498	784.279.000	1.838.040	784.279.000	2.398.592.900	3
						14	Penyediaan Administarsi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang	19.239.000	15.900.000	5	15.900.000	2.860.000	15.900.000	44.500.000	2
						15	Pelaksanaan Admisnitrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	Jumlah Orang	18.313.350	15.135.000	12	15.135.000	561.250	15.135.000	28.605.000	2
						16	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas		27.830.000	23.000.000	12	23.000.000	1.916.667	23.000.000	61.000.000	2
						17	Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	Jumlah dokumen	17.995.120	14.872.000	3	14.872.000	3.204.000	14.872.000	33.846.000	2
						18	Fasilitasi Organisasi ASN dan Non ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang Terfasilitasi	36.300.000	30.000.000	2	30.000.000	12.500.000	30.000.000	55.000.000	2
						19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Tenaga Honor	291.779.400	241.140.000	11	241.140.000	18.212.727	241.140.000	641.820.000	2

						20	Penyediaan Jasa Publikasi	Terwujudnya Publikasi/Informasi Kegiatan DPMD	6.050.000	5.000.000	12	5.000.000	5.000.000	17.500.000		
						Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "BAIK"	100%							
						1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	285.560.000	236.000.000	4	236.000.000	76.850.000	236.000.000	543.400.000	2
						2	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 kegiatan	66.200.000		1		66.200.000		66.200.000	1
						3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	192.500.000	30.000.000	5	30.000.000	38.500.000	30.000.000	222.500.000	1
						4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	103.031.500	85.150.000	2	85.150.000	36.050.000	85.150.000	218.350.000	2
						5	Rehabilitasi/Penataan Gudang Kantor	Presentase Rehabilitasi/Penataan Gudang Kantor		30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
						6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Halaman Kantor	Jumlah Halaman		97.500.000		97.500.000	97.500.000	80.000.000		
						Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Presentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	90%	87%	87%	87%	85%	85%	
						1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur	351.420.905	290.430.500	17	290.430.500	9.101.235	290.430.500	545.151.500	2
						Program: Peningkatan Disiplin aparaturnya		Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 Tahun	97,5%	97,5%	95,0%	95,0%	95,0%	85,5%	85,5%	
						1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah baju yang di buat	43.350.000	43.350.000	54	43.350.000	802.778	43.350.000	105.250.000	2
						2	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah baju yang di buat	45.000.000	45.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000	1
						3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian		59.000.000		59.000.000		59.000.000	25.000.000	
						Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B							

						1.	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah Dokumen	19.475.714	16.000.000	2	16.000.000	8.000.000	16.000.000	48.000.000	2	
						2.	Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD	Jumlah dokumen	7.500.000	10.096.000	12	10.096.000	619.250	10.096.000	37.339.000	5	
						3.	Penyusunan RKT dan PKT	Jumlah Dokumen	15.823.170	13.077.000	12	13.077.000	1.178.750	13.077.000	45.222.000	3	
						4.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	13.963.400	11.540.000	20	11.540.000	627.600	11.540.000	42.727.000	3	
						5.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	10.046.630	8.303.000	20	8.303.000	459.650	8.303.000	31.729.000	3	
								Jumlah Desa Mandiri dan Persentasi Status Desa	24 DESA	6 DESA	-	-					
							Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan desa di bina	100%	80%	75%	75%	75%	70%	70%		
						1	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa			100%		110.000.000		199.934.000		
						2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa	% Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	321.563.550	265.755.000		265.755.000		265.755.000	265.755.000		1
						3	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peserta Bimtek dan Jumlah Desa yang Mendapat Pendampingan	462.374.479	368.562.500		368.562.500		368.562.500	368.562.500		1
						4	Monitoring Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan ADD	Jumlah Desa yang mendapat pemantauan penggunaan dana desa dan ADD	575.302.123		278		1.554.795		432.233.000		1
						5	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa	Jumlah Desa	165.834.000	165.834.000	278	165.834.000		165.834.000			
						6	Monitoring, Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa	590.153.000	590.153.000	278	590.153.000		590.153.000			

							Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Presentase desa yang sudah mampu menyusun data profil dan IDM	100%	90%	85%	85%	85%	75%	75%		
						1	Pembinaan dan Pengembangan TTG, Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa	Jumlah Kelompok	120.000.000	197.298.000		197.298.000		197.298.000	77.353.000	1	
						2	Pemutakhiran Data Profil Desa dan Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Buku Profil Desa dan Indeks Desa Membangun	333.553.900		278		1.199.834		333.553.900	1	
						3	Pembinaan Posyantekdes	Jumlah Posyantekdes yang sudah terbina	454.627.303		23		12.309.826		698.721.000	2	
						5	Pelatihan/Pengolahan data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pelatihan/pengolahan data Profil Desa									
						6	Pengolahan/verifikasi Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang sudah memiliki Profil Desa dan Kelurahan		-	75	-	1.236.409	-	92.730.697		
						7	Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	88.661.536	-	100	-	816.980	-	509.335.000	6	
						8	Fasilitasi Sumber Energi Baru dan terbaru Kan (TTG)	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dan Monitoring Pemafaatan Potensi SDA dan Pengembangan TTG di Desa	75.000.000								
						9	Mengikuti Kegiatan TTG TK. Provinsi dan Nasional	Mengikuti Kegiatan Gelar TTG Tingkat Prov dan Nasional	120.531.000	120.531.000			120.531.000		120.531.000	120.531.000	1
						10	Perencanaan pembangunan desa mandiri	Jumlah Desa yang di bangun							250.000.000		
						11	Pemutakhirandan Validasi Data Profil Desa	Jumlah Desa	100.000.000	168.486.900			200.000.000		168.486.900	200.000.000	2
						12	Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	385.978.000	253.927.000			385.978.000		253.927.000	385.978.000	1

						13	Fasilitasi Pengenalan Program Aplikasi WEBSITE Desa	Jumlah Desa	248.000.000								0	0
						14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Desa	100.000.000								0	
						15	Pendidikan kemasyarakatan dalam menunjang perencanaan pembangunan kawasan desa	Jumlah Desa yang mengikuti pendidikan dalam menunjang perencanaan pembangunan kawasan desa	100.000.000								0	
						16	Penyediaan Listrik Desa	Tersediannya Listrik Desa	2.500.000.000	2.062.000.000	31 Rumah	2.062.000.000		2.062.000.000		2.685.000.000		
						17	Inventarisasi Potensi dan Identifikasi Masalah SDA di Perdesaan	Jumlah Desa yang Di Petakan	278.000.000								0	0
						18	Penyelenggaraan Gelat Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok		236.887.000		236.887.000		236.887.000		236.887.000		
							Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	BUMDes Sehat										
						1.	Rakor Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga ekonomi Desa	Jumlah Desa yang mendapat Rakor pembinaan lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa	80.765.612									
						2.	Fasilitas Pembentukan BUMDesa	Jumlah Bumdes yang terfasilitasi dalam pembentukannya	130.000.000	91.613.000	150	91.613.000		91.613.000		236.253.000		2
						3	Pelatihan Menejemen BUMDes	Jumlah BUMDes yang mendapat pelatihan	220.000.000	184.703.000	50	184.703.000	1.407.060	184.703.000		255.056.000		1
						4	Monitoring evaluasi pengelolaan bantuan Bumdes dan Bumdes Bersama	jumlah desa yang mendapat bantuan dalam pengelolaan BUMDesa dan BUMDes Bersama	90.000.000									
						5	Surve Potensi Produk Unggulan BUMDES	Jumlah Desa Yang Memiliki Produk Unggulan			31					500.000.000		
						6	Pendampingan Adminitrasi PNPM Generasi	Jumlah Desa yang mendapat pendampingan dari Fasilitator								364.343.500		
						7	Pendampingan Adminitrasi Program Generasi Sehat Cerdas	Jumlah Desa Mendapat Pendampingan			86		2.004.180			172.359.500		

Tabel 2.1.1

Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2017

NO	PROGRAM		KEGIATAN
1	Pelayanan Adminitrasi Dan Perkantoran	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		d.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
		e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		g.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		i.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		j.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
		k.	Penyediaan Makanan dan Minuman
		l.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
		m.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
		n.	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa
		o.	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD
p.	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas		
q.	Penyusunan RKA Dan DPA SKPD		

		r.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
		s.	Penyediaan Jasa Publikasi
		c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
2.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	a.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Oprasional
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	a.	Pengadaan Pakaian Khas Hari- hari Tertentu
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	a.	Pendataan Dan Pengelolaan Aset SKPD
		b.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahunan SKPD
		c.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
		d.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
5.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	a.	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan
6.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	a.	Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi Tepat Guna
		b.	Fasilitasi Pembentukan BUMDes
		c.	Perencanaan Pembangun Desa Mandiri
		d.	Monitoring, Evaluasi Pengelolaan Bantuan BUMDes Bersama
7.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	a.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
		b.	Penyelenggaraan Lomba Desa
		c.	Fasilitasi lembaga Adat Kabupaten Kapuas
		d.	Rapat Koordinasi Tugas Pembinaan Pemerintahan Desa
		e.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa
		f.	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD KODIM

			1206/PTS
		g.	Fasilitasi Pelaksanaan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus 644 WS
8.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	a.	Sosialisasi Tentang Peraturan Perundang – Undangan Tentang Desa
		b.	Pelatihan Singkat Pemakaian Alat GPS Untuk Pengukuran Batas Desa
		c.	Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa Dusun Dan RT
		d.	Pelatihan Komputer Dan Internet
9.	Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	a.	Pembinaan Kelompok P2WKSS
10.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	a.	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa
11.	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	a.	Pendampingan Administrasi Program PNPM PMD Generasi
12.	Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	a.	Fasilitasi Pengendalian Dan Pencegahan Konflik Lahan Dan Sumber Daya Alam Desa
13.	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	a.	Penyediaan Listrik Perdesaan

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 di rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Anggaran dan Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
Anggaran 2017

N O	NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000.00	100.00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	87.600.000,00	62.316.288.00	71.14
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	84,180,000.00	79.980.000.00	95.01
4.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	76.382.000,00	72.782.000.00	95.29
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000,00	10.000.000.00	100.00
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.583.000,00	19.583.000.00	100.00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.772.000,00	22,772,000.00	100.00
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000,00	3,600,000.00	100.00
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.500.000,00	50,410,000.00	99.82
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.640.000,00	5.640,000.00	100.00
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	108.960.000,00	108,960,000.00	100.00
12.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	1.034.702.000,00	1,034,701,196.00	100.00
13.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	868.680.000,00	868.593.000.00	99.99
14.	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan	14.300.000,00	13,400,000.00	93.71

	Barang dan Jasa			
15.	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	6.735.000,00	6,735,000.00	100.00
16.	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	23.000.000,00	23,000,000.00	100.00
17.	Penyusunan RKA Dan DPA SKPD	9.362.000,00	9,362,000.00	100.00
18.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	200.340.000,00	199,140,000.00	99.40
19.	Penyediaan Jasa Publikasi	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	72.100.000,00	72,100,000.00	100.00
21.	Pengadaan Pakaian Khas Hari-Hari Tertentu	18.550.000,00	18,497,000.00	99.71
22.	Pendataan Dan Pengelolaan Aset	7.500.000,00	7,500,000.00	100.00
23.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahunan SKPD	10.477.500,00	10,477,500.00	100.00
24.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan laporan Keuangan SKPD	12.552.000,00	12,552,000.00	100.00
25.	Penyusunan Penyampaian Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	9.193.000,00	9,193,000.00	100.00
26.	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan	224.666.000,00	224,659,000.00	100.00
27.	Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi Tepat Guna	857.713.000,00	856.254,000.00	99.83
28.	Fasilitasi Pembentukan BUMDes	71.255.000,00	71,255,100.00	100.00
29.	Perencanaan Pembangunan Desa Mandiri	250.000.000.00	248,600,000.00	99.44
30.	Monitoring, Evaluasi Pengelolaan Bantuan Bumdesdan Bumdes Bersama	50.789.000,00	50.789.000,00	100.00

31.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	156.523.000,00	156.523.000,00	100.00
32.	Penyelenggaraan Lomba Desa	267.266.000,00	267.266.000,00	100.00
33.	Fasilitasi Lembaga Adat Kabupaten Kapuas Hulu	567.196.000,00	567.196.000,00	100.00
34.	Rapat Koordinasi Tugas Pembinaan Pemerintahan Desa	43.550.000	43.550.000	100.00
35.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa	556.203.000,00	556,190,000.00	100.00
36.	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD KODIM 12/PSB	2.000.000.000,00	1.977.700.000.00	98.89
37.	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus 644 WS	200.000.000,00	200.000.000,00	100.00
38.	Sosialisasi Peraturan Tentang Perundang-Undangan Tentang Desa	251.306.000,00	706.921.000.00	99.76
39.	Pelatihan Singkat Pemakayan Alat GPS Untuk Pengukuran Batas Desa	126.322.000,00	126.322.000,00	100.00
40.	Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa Dusun dan RT	247.691.000,00	247.691.000,00	100.00
41.	Pelatihan Komputer dan Internet	83.290.000,00	83.102.000,00	99.77
42.	Pembinaan Kelomok P2WKSS	277.515.000	277.515.000.00	100.00
43.	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa	89.934.000,00	89.934.000.00	100.00
44.	Pendampingan Adminitrasi Program PNPM MPD Generasi	364.343.500,00	364.343.500.00	100.00
45.	Fasilitasi Pengendalian dan Pencegahan Konflik Lahan Dan Sumber Daya Alam Desa	134.362.000,00	134.362.000.00	100.00
46.	Penyediaan Listrik Pedesaan	767.375.000,00	764.594.000.00	99.64
Jumlah		9.977.924.000,00	9,908,261,954.00	98.93

Tabel 2.1.3
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2017

Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Presentase Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang Mendapat Pelatihan TTG	30%	8,99%	9%
Meningkatannya Kapasitas Aparatur Desa	Presentase Desa yang Adminitrasi Pengelolaan Keuangan Desa Tertib	64,75%	68,34%	68,34%
	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	80,94%	70,14%	70,14%
	PKK Aktif	83,94%	83,94%	100%
	Posyandu Aktif	86,04%	86,04%	100%

Dari tabel 2.1.3 diatas dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 berupa capaian 86 - 100 %.berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat di nilai dengan penilaian berikut ini :

1. Kegiatan dengan realisalsi anggaran yang mencapai 86% - 100% dikategorikan berhasil / tercapai.Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya.
2. Kegiatan dengan realisasi anggaranyang mencapai > 85 dan dikategorikan tidak tercapai.

Dalam sub Bab ini Juga dilampirkan Tabel 2.1.3 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Tahun 2017 - 2018 (Tahun Berjalan)

2.2 Analisis Pelayanan OPD

Masing - masing misi yang diemban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tujuan berkaitan dengan upaya melaksanakan harapan - harapan yang tersirat dalam visi. Ada pun tujuan tersebut memberikan arah yang lebih jelas agar perbaikan-perbaikan/ harapan yang ingin di capai lebih terfokus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satu penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki visi yang tertuang dalam Renstra 2016 - 2021 yaitu ,*" Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis "*.

Dimana hasil dari penjabaran visi yang merupakan misi Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Mewujudkan pemerintahan Desa yang Partisipatif, Transparan, Akuntabel, dan Mandiri.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Sosial Ekonomi Desa.

Strategi Organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang di tetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Adanya peningkatan aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahn Desa
- b. Adanya peningkatan kemampuan dalam pemahaman Aparatur desa dibidang adminitrasi desa khususnya pengelolaan keuangan desa.
- c. Adanya Peningkatan pembangunan infrastruktur desa melalui gotong royong masyarakat.
- d. Adanya peningkatan pemahaman kelembagaan desa dalam menyelesaikan batas desa

- e. Adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan desa Dalam pendayagunaan teknologi tepat guna menunjang perekonomian masyarakat setempat.
- f. Adanya peningkatan masyarakat desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang efektif dan efisien.
- g. Adanya peningkatan percepatan penyelesaian Adminitrasi Profil Desa.
- h. Adanya peningkatan fungsi BUMDes yang telah terbentuk.
- i. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang BUMDes.
- j. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- k. Adanya Peningkatan peran wanita didalam membantu penambah /penunjang penghasilan keluarga.

Dari penjabaran visi misi dan strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu perlu disajikan dalam bentuk Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat di lihat pada Tabel 2.2.1 ;

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Pencapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (Tahun 2015)	(Tahun 2016)	(Tahun 2017)	Tahun (Tahun 2018)	Tahun (Tahun 2019)	Tahun (Tahun 2020)	Tahun (Tahun n)	Tahun (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Predikat saki						CC					
1	presentase peningkatan sataus desa						100%	100%	100%			

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dalam:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Melaksanakan uraian pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan Adminitrasi dinas dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu disesuaikan pada target yang telah disusun sesuai indicator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016 - 2021, RKPD 2018 serta Renja SKPD 2019. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017-2018.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Kegiatan	90%
2	Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya peran serta kelompok Posyantekdes di Kecamatan	Kegiatan	90%
3	Fasilitasi Pembentukan BUMDes	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kegiatan	90%
4	Perencanaan Pembangunan Desa Mandiri	Terbentuknya BUMDesa	Kegiatan	75%
5	Monitoring, Evaluasi Pengelolaan Bantuan Bumdes dan Bumdes Bersama	Terlaksananya Pelestarian Masyarakat dalam Pembangunan	Kegiatan	95%
6	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bhakti gotong royong	Kegiatan	100%
7	Penyelenggaraan Lomba Desa	Terlaksananya lomba Desa Tingkat Kabupaten	Kegiatan	95%
8	Fasilitasi Lembaga Adat Kabupaten Kapuas Hulu	Terwujudnya pembinaan Lembaga Adat	Kegiatan	95%

9	Rapat Koordinasi Tugas Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengendalian dan penyelesaian masalah/Konflik Pemerintahk Desa	Kegiatan	95%
10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memonitoring dan terevaluasi masalah Patok Desa	Kegiatan	95%
11	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD KODIM 12/PSB	Terlaksananya sosialisasi Penataan Wilayah	Kegiatan	80%
12	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus 644 WS	Terarahnya Pelaksanaan Tugas	Kegiatan	90%
13	Sosialisasi Peraturan Tentang Perundang-Undangan Tentang Desa	Adanya Pembinaan administrasi asset Desa Pemerintah Desa	Kegiatan	80%
14	Pelatihan Singkat Pemakayan Alat GPS Untuk Pengukuran Batas Desa	Pemahaman Aparatur Desa akan Penggunaan Alat GPS	Kegiatan	70%
15	Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa Dusun dan RT	Terbentuknya peran wanita dalam menuju kemandirian dan kesejahteraan keluarga	Kegiatan	95%
16	Pelatihan Komputer dan Internet	Pendamping terhadap program PNPM MPD Generasi	Kegiatan	95%

17	Pembinaan Kelomok P2WKSS	Terbinanya Kelompok		95%
18	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa	Telkasananya Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa		95%
18	Pendampingan Adminitrasi Program PNPM MPD Generasi	Terlaksananya Pendampingan Adminitrasi Program PNPM MPD		95%
20	Fasilitasi Pengendalian dan Pencegahan Konflik Lahan Dan Sumber Daya Alam Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengendalian dan Pencegahan Konflik Lahan Dan Sumber Daya Alam Desa		95%
21	Penyediaan Listrik Pedesaan	Tersedianya Listrik Pedesaan		95%

Adapun Isu - isu penting yang merupakan bagian dari masalah tetapi belum menjadi masalah publik, isu berkembang dari orang perorang kemudian dapat berkembang menjadi persoalan orang banyak, dan mulai ramai di perbincangkan baik melalui berbagai media,disinilah letak isu menjadi masalah publik, isu - isu tersebut harus diminej atau di kelola dengan berbagai kebijakan dan program -program yang mampu meminimalisir terjadinya masalah yang lebih besar.

Oleh karenanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu melihat dan mengidentifikasi isu-isu yang ada selama ini sebagai isu strategis adalah sebagai berikut ;

1. Masih kurang nya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangn desa.
2. Sebagian belum tersusunnya aset/ kekayaan di desa.
3. Minimnya pengetahuan aparatur desa dalam pengadaan barang/ jasa di desa .
4. Sebagian masih belum terselesaikannya masalah Patok Batas Desa.

5. Masih perlunya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
6. Pengoptimalan data profil desa sehingga data perencanaan pembangunan di desa lebih akurat.
7. Minimnya Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan SDA desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja SKPD

Rencana Kerja adalah Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui berbagai kegiatan.

Rancangan Awal dari RENJA 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Meliputi 13 Prodgram dan 46 Kegiatan Dengan jumlah pagu anggaran 12.653.693.000,00,- (Dua belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) Kegiatan yang disusun dari rencana awal Renja 2017 sudah termasuk usulan dari masyarakat melalui Musrenbang baik Tingkat Desa atau Kecamatan, dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

No	Rancangan Awal Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	8	4	5	6	12
Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran			Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%		Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD DPMD KH	Jumlah Materai	176	1.056.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD DPMD KH	Jumlah Materai	176	1.056.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	SKPD DPMD KH	Jumlah jasa layanan	5 rekening	60.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	SKPD DPMD KH	Jumlah bulan langganan	12 BLN	110.600.000	
3	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	SKPD DPMD KH	Jumlah Tenaga Administrasi	3 org	84.180.000	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	SKPD DPMD KH	Jumlah Tenaga Administrasi	15 org	84.180.000	
4	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah tenaga pengamanan dan kebersihan kantor	4 Org	76.782.000	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah tenaga pengamanan dan kebersihan kantor	4 Org	76.782.000	

5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD DPMD KH	Jumlah Peralatan Kerja	3 Jenis	15.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD DPMD KH	Jumlah Peralatan Kerja	3 Jenis	15.000.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Alat tulis kantor	21 Jenis	60.963.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Jenis tulis kantor	21 Jenis	60.963.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD DPMD KH	Jumlah Barang Cetak	11 Jenis	64.970.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD DPMD KH	Jumlah Barang Cetak	11 Jenis	106.370.100	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Peralatan Listrik	4 Jenis	48.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Peralatan Listrik	4 Jenis	48.600.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Peralatan /Perlengkapan	13 Jenis	151.495.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Peralatan /Perlengkapan	13 Jenis	151.495.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	SKPD DPMD KH	Jumlah media cetak	4 Media Cetak	5.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	SKPD DPMD KH	Jumlah media cetak	4 Media Cetak	5.640.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD DPMD KH	Jumlah Aparatur	54 org	271.570.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD DPMD KH	Jumlah Aparatur	54 org	271.570.000	
12	Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	SKPD DPMD KH	% Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	95%	398.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	SKPD DPMD KH	% Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	95%	398.000.000	

13	Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	SKPD DPMD KH	% Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	95%	761.000.000	Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	SKPD DPMD KH	% Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	95%	761.000.000	
14	Penyediaan Administarsi Pengadaan Barang Dan Jasa	SKPD DPMD KH	Jumlah Orang	7 org	15.900.000	Penyediaan Administarsi Pengadaan Barang Dan Jasa	SKPD DPMD KH	Jumlah Orang	7 org	15.900.000	
15	Pelaksanaan Admisnitasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah Orang	12 BLN	15.135.000	Pelaksanaan Admisnitasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah Orang	12 BLN	15.135.000	
16	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	SKPD DPMD KH	Jumlah alat transportasi	1 jenis	23.000.000	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	SKPD DPMD KH	Jumlah alat transportasi	1 jenis	23.000.000	
17	Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	SKPD DPMD KH	Jumlah dokumen	3 DOK	14.872.000	Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	SKPD DPMD KH	Jumlah dokumen	3 DOK	14.872.000	
18	Fasilitasi Organisasi ASN dan Non ASN	SKPD DPMD KH	Jumlah ASN dan Non ASN yang Terfasilitasi	2 Organisasi	30.000.000	Fasilitasi Organisasi ASN dan Non ASN	SKPD DPMD KH	Jumlah ASN dan Non ASN yang Terfasilitasi	2 Organisasi	30.000.000	
19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Tenaga Honor	12 ORG	241.140.000	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Tenaga Honor	12 ORG	241.140.000	
20	Penyediaan Jasa Publikasi	SKPD DPMD KH	% Terpublikasinya Info Kegiatan DPMD	99%	5.000.000	Penyediaan Jasa Publikasi	SKPD DPMD KH	% Terpublikasinya Info Kegiatan DPMD	99%	5.000.000	
21	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	SKPD DPMD KH	% Terpublikasinya Info kegiatan DPMD	99%	50.000.000	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	SKPD DPMD KH	% Terpublikasinya Info kegiatan DPMD	99%	50.000.000	

Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "BAIK"	100%		Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "BAIK"	100%		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD DPMD KH	Jumlah Kendaraan	5 UNIT	142.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD DPMD KH	Jumlah Kendaraan	5 UNIT	142.500.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD DPMD KH	Jumlah Kendaraan	3 Unit	85.150.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD DPMD KH	Jumlah Kendaraan	3 Unit	85.150.000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD DPMD KH	Presentase terpeliharanya ruangan	95%	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Kantor	SKPD DPMD KH	Presentase terpeliharanya ruangan	95%	30.000.000	
4	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	SKPD DPMD KH	Jumlah Kegiatan	1 keg	127.500.000	Jumlah Kegiatan	SKPD DPMD KH	Jumlah Kegiatan	1 keg	127.500.000	
Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			Presentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75%				Presentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90%		
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD DPMD KH	Jumlah Aparatur	21 org	290.430.500	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD DPMD KH	Jumlah Aparatur	21 org	290.430.500	
Program: Peningkatan Disiplin aparatur			Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 Tahun					Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 Tahun			

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	SKPD DPMD KH	Jumlah Pakaian	2 pakaian	9.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	SKPD DPMD KH	Jumlah Pakaian	2 pakaian	9.000.000	
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB				Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB		
1	Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah dokumen	4 Dok	10.096.000	Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah dokumen	4 Dok	10.096.000	
2	Penyusunan RKT dan PKT	SKPD DPMD KH	Jumlah Dokumen	3 dok	13.077.000	Penyusunan RKT dan PKT	SKPD DPMD KH	Jumlah Dokumen	3 dok	13.077.000	
3	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah Dokumen	20 dok	11.540.000	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah Dokumen	20 dok	11.540.000	
4	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah Dokumen	20 dok	8.303.000	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	SKPD DPMD KH	Jumlah Dokumen	20 dok	8.303.000	
			Jumlah Desa Mandiri dan Persentasi Status Desa	6 desa Mandiri				Jumlah Desa Mandiri dan Persentasi Status Desa	6 desa Mandiri		
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Presentase Desa Tertib Adminitrasi Pengelolaan Keuangan Desa	95%				Presentase Desa Tertib Adminitrasi Pengelolaan Keuangan Desa	95%		
1	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana	SKPD DPMD KH	% Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat	278 Desa	165.834.000	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi	SKPD DPMD KH	% Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat	278 Desa	165.834.000	

	Desa dan Alokasi Dana Desa		Waktu			Dana Desa		Waktu			
3	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang didampingi penyusunan APBDes	278 Desa	610.503.000	Monitoring, Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang didampingi penyusunan APBDes	278 Desa	610.503.000	
			Jumlah Desa yang di Asistensi APBDesnya	278 Desa				Jumlah Desa yang di Asistensi APBDesnya	278 Desa		
			Jumlah Laporan Penyerapan dan Realisasi APBDes	278 Desa				Jumlah Laporan Penyerapan dan Realisasi APBDes	278 Desa		
4	Pembinaan Adminitrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang dibina Adminitrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	278 DESA	196.660.000	Pembinaan Adminitrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang dibina Adminitrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	278 DESA	196.660.000	
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			Jumlah Inovasi desa	2 Inov		Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah Inovasi desa	2 Inov		
2	Pemutakhiran Data dan Validasi Data Profil Desa	SKPD DPMD KH	% Cakupan data Profil Desa	75%	138.343.900	Pemutakhiran Data dan Validasi Data Profil Desa	SKPD DPMD KH	% Cakupan data Profil Desa	75%	138.343.900	
3	Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang di fasilitasi	278 Desa	208.371.000	Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang di fasilitasi	278 Desa	208.371.000	
4	Penyelenggaraan Gelat Teknologi Tepat Guna	SKPD DPMD KH	Jumlah Pokmas yang ikut serta dalam pameran TTG tingkat kabupaten	23 Kec	81.860.000	Penyelenggaraan Gelat Teknologi Tepat Guna	SKPD DPMD KH	Jumlah Pokmas yang ikut serta dalam pameran TTG tingkat kabupaten	23 Kec	81.860.000	

5	Penyediaan Listrik desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Rumah	5 Lokasi	1.565.000.000	Penyediaan Listrik desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Rumah	5 Lokasi	1.565.000.000	
Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan			Jumlah BUMDes Sehat	25 Bumdes				Jumlah BUMDes Sehat	25 Bumdes		
			% Desa yang memiliki BUMDes	60%				% Desa yang memiliki BUMDes	60%		
1	Fasilitas Pembentukan BUMDesa	SKPD DPMD KH	Jumlah Bumdes yang terpasilitasi dalam pembentukannya	50 DESA	200.000.000	Fasilitas Pembentukan BUMDesa	SKPD DPMD KH	Jumlah Bumdes yang terpasilitasi dalam pembentukannya	50 DESA	200.000.000	
2	Pelatihan Menejemen BUMDes	SKPD DPMD KH	Jumlah BUMDes yang mendapat pelatihan	100 DESA	193.403.000	Pelatihan Menejemen BUMDes	SKPD DPMD KH	Jumlah BUMDes yang mendapat pelatihan	100 DESA	193.403.000	
3	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif	SKPD DPMD KH	Jumlah Usaha Yang Di Bina	100 Desa	150.000.000	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif	SKPD DPMD KH	Jumlah Usaha Yang Di Bina	100 Desa	150.000.000	
Program : Peningkatan Pertisifasi Masyarakat dalam Membangun Desa			% Lembaga Kemasyarakata n Desa Aktif	100%					100%		
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	278 Desa	183.403.000	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	278 Desa	183.403.000	
2	Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang mendapat Evaluasi	278 Desa	359.443.000	Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang mendapat Evaluasi	278 Desa	359.443.000	
			Jumlah Pendampingan Desa yang akan di evaluasi	23 Desa				Jumlah Pendampingan Desa yang akan di evaluasi			

3	Fasilitasi Lembaga Adat Kab.Kapuas Hulu	SKPD DPMD KH	Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	59 Org	492.556.000	Fasilitasi Lembaga Adat Kab.Kapuas Hulu	SKPD DPMD KH	Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	59 Org	492.556.000	
4	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (KPMD) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah KPMD	278org /desa	100.000.000	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (KPMD) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah KPMD	36 Desa	100.000.000	
5	Pembinaan PKK Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Pkk Desa	36 Desa	117.496.000	Pembinaan PKK Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Pkk Desa	36 Desa	117.496.000	
6	Pembinaan Pelayanan Sosial dasar	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang dibina	36 Desa	132.504.000	Pembinaan Pelayanan Sosial dasar	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang dibina	36 Desa	132.504.000	
7	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1226/PSB	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang terfasilitasi	1 Desa	1.000.000.000	Terlaksananay Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1226/PST	SKPD DPMD KH	1000.000.000	1 keg	1000.000.000	
8	Fasilitasi Pelaksanaan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus 644 WS	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang terfasilitasi	1 Desa	200.000.000	Terlaksananya Pelaksanaan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus 644 WS	SKPD DPMD KH	200.000.000	1 keg	500.000.000	
9	Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI Kodim 1206/PSB	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang terfasilitasi	1 Desa	300.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI Kodim 1206/PSB	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang terfasilitasi	1 Desa	300.000.000	
Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			% Desa yang tata kelola pemerintahan desa yang baik	90%				% Desa yang tata kelola pemerintahan desa yang baik	90%		
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	SKPD DPMD KH	Jumlah Pendampingan Musrebangdes	23 Desa	164.780.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Pendampingan Musrebangdes	23 Desa	164.780.000	

	Desa		Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	556 Org				Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	556 org		
2	Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	SKPD DPMD KH	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	278 Desa	225.675.000	Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	SKPD DPMD KH	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	278 Desa	225.675.000	
3	Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang di bina	26 Desa	444.700.000	Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	SKPD DPMD KH	Jumlah Desa yang di bina	26 Desa	444.700.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada program yang ada pada RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu .

Untuk mencapai program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memperhatikan isu-isu penting menjadi masalah/ persoalan orang banyak.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.:

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Indikat or Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
	Kegiatan					
1	Pembinaan dan Pengembangan TTG, Posyantek Desa Dan Posyantek Antar Desa	10 Kec	Jumlah Posyantek Antar Desa	10 Kec	1 Kegiatan	
2	Penyelenggaraan Gelat Teknologi Tepat Guna	Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	1 Kegiatan	3	1 Kegiatan	

		Tingkat Provinsi : Sambas Tingkat Nasional : Bengkulu				
3	Fasilitasi Pemutahiran Data Indeks Desa Membangun	278 Desa	Jumlah Desa	278 Desa	1 Kegiatan	
4	Pemutahirah Data dan Validasi Data Profil	Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Empanang,Puring Kencana,Embaloh Hilir, Bunut Hilir	Jumlah Desa	278 Desa	1 Kegiatan	
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					
	Kegiatan					
1	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Kapuas Hulu	Jumlah Desa	60 Desa	1 Kegiatan	
2	Monitoring, Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	Kapuas Hulu	Jumlah Desa	60 Desa	1 Kegiatan	
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan					
	Kegiatan					
1	Pelatihan Manajemen	Putussibau	Jumlah	100	1	

	BUMDes		Bumdes Yang Mempunyai Laporan Bumdes Dengan Baik	Bumdes	Kegiatan	
2	Fasilitasi Pembentukan BUMDes	Semitau dan Batang Lupar	Jumlah Desa yang mempunyai BUMDes	50 Bumdes	1 Kegiatan	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa					
	Kegiatan					
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa			1 Kegiatan	
2	Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	Desa	Jumlah Desa	278 Desa	1 Kegiatan	
3	Fasilitasi Lembaga Adat Kab.Kapuas Hulu	PTS	Jumlah Perangkat Adat	61 Orng	1 Kegiatan	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					
	Kegiatan					
1	Pembinaan Adminitrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	6 Lokasi	Jumlah Desa	278 Desa	1 Kegiatan	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	% Desa yang menyusun RKPDes tepat	80%	1 Kegiatan	

			waktu			
3	Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	Jumlah Desa yang Mengikuti	278 Desa	1 Kegiatan	
4	Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	Desa	Jumlah Desa		1 Kegiatan	
5	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	% Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	80%	1 Kegiatan	
6	Pembinaan Pelayanan Publik	Desa	% Desa yang menerapkan Pelayanan Publik	80%	1 Kegiatan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah :

" TRWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG "

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokrasi berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi,,maju,dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu;
7. Mewujudkan masyarakat yang bekepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 adalah tahapan ke tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang telah ditetapkan

melalui UU Nomor 17 tahun 2007.RPJMN ke-3 (2015 - 2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Untuk mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju indonesia yang berdaulat secara politik,mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan, dirumuskan sebagai agendaprioritas dalam pemerintahan kedepan.

Kesembilan agenda prioritas itu di sebut NAWA CITA,yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asing lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinika-an dan memperkuat restirasi sosial indonesia.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran visi - misi Gubernur yang bersinegi dengan Visi - misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan

dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi Visi, Misi, Tujuan, dan program Kepala Daerah. Mengacu Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018, maka visi kepala daerah adalah:

" MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG
BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN
SEJAHTERA "

Sebagaimana telah dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2013 - 2018, bahwa terdapat 3 kebijakan umum yang akan di tempuh selama 5 tahun kedepan dalam mencapai visi pembangunan daerah adalah :

- a. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan lima tahun mendatang guna melanjutkan masyarakat Kalimantan Barat yang berimansehat, cerdas, aman, berbudaya, dan sejahtera dalam bentuk percepatan pembangunan yang di dukung oleh infrastruktur dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, yang di wujudkan dengan bertumpu perbaikan kualitas sumberdaya manusia,serta terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- b. Melaksanakan kebijakan nasional sebagai mana yang dituangkan dalam masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terkait komoditas unggulan Kalimantan Barat yaitu pengelolaan produk yang berbasis kelapa sawit dan Bauksit. disisi lain juga melaksanakan kebijakan yang telah di gariskan dalam masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
- c. Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana disebutkan pada butir diatas diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sistem hukum yang berfungsi secara kredibel, Bersih, adil serta pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019.

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah agar dapat mempertanggung jawabkan kinerja yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dapat tercapai.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 juga agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu berkarya dan berkembang dalam rangka peningkata kinerja profesionalnya.

Ada pun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah;

1. Untuk menjabarkan arahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 - 2021 kedalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Menjabarkan visi - misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 - 2021 kedalam tujuan, sasaran, dan programkerja oprasional;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, penigkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektifitas pembangunan sumber daya organisasi

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa (ikuti renstra)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2019
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan Akuntabel dan Mandiri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	Predikat SAKIP	BB
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	6
Persentase Peningkatan Status Desa			100%	

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran di tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 11 program sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi sakip di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Kapuas hulu secara bertahap yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 5 Program yaitu:

Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Capaian

Kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD
- b. Penyusunan RKT dan PKT
- c. Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- d. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
- e. Penyusunan Renja dan Renstra

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f. Penyediaan jasa alat tulis kantor
- g. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- j. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi dan kunjungan kerja keluar daerah
- m. Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi dan kunjungan kerja dalam daerah
- n. Penyediaan jasa pengadaan barang dan jasa
- o. Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan OPD
- p. Penyediaan jasa sewa mobilitas
- q. Penyusunan RKA dan DPA,DPPA
- r. Fasilitasi organisasi ASN dan Non ASN

- s. Penyediaan Jasa pendukung kantor
- t. Penyediaan Jasa Publikasi

Program : Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin / Bekala lampu Hias
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang kantor

Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan Formal

Program: Peningkatan Disiplin aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut

Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Desa

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan :

- a. Monitoring Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- b. Monitoring Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa
- c. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- b. Pembinaan Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa
- c. Pemutakhiran Dan Validasi Data Profil Desa
- d. Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun
- e. Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna
- f. Penyediaan Listrik Perdesaan

Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pembentukan BUMDes
- b. Pelatihan Manajemen BUMDes
- c. Pembinaan Usaha Ekonomi Desa

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
- b. Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa
- c. Fasilitasi Lembaga Adat Kab. Kapuas Hulu
- d. Pembinaan Lembaga Masyarakat (KPMMD)
- e. Pembinaan PKK
- f. Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1226/PST
- g. Fasilitasi Pelaksanaan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus
644 WS

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset Pemerintah Desa
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa
- d. Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se
Kabupaten Kapuas Hulu
- e. Pembinaan Pelayanan Publik Di Desa
- f. Pembinaan Peningkatan Status Desa

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini 3.3.

Tabel 3.3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu**

kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran		100%				100%	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	DPMD	176	1.056.000	DAU		193	1.161.600
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	DPMD	5 rekening	60.600.000	DAU		5 rekening	161.956.080

				3	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah orang	DPMD	3 org	84.180.000	DAU		15 org	112.043.580
				4	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Honor	DPMD	4 Org	76.782.000	DAU		4 Org	93.170.000
				5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja	DPMD	3 Jenis	15.000.000	DAU		3 Jenis	16.500.000
				6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	DPMD	21 Jenis	60.963.000	DAU		21 Jenis	67.059.300
				7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	DPMD	11 Jenis	64.970.000	DAU		11 Jenis	42.592.000
				8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	DPMD	20 Jenis	48.600.000	DAU		20 Jenis	47.600.000
				9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan /Perlengkapan	DPMD	13 Jenis	151.495.000	DAU		13 Jenis	345.614.500
				10	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	Jumlah bulan langganan	DPMD	12 BLN	5.640.000	DAU		12 BLN	6.204.000

				11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Aparatur	DPMD	54 org	271.570.000	DAU		54 org	298.727.000
				12	Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	DPMD	125 X	398.000.000	DAU		138 X	796.911.060
				13	Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DPMD	442 X	761.000.000	DAU		486 X	862.706.900
				14	Penyediaan Administarsi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang	DPMD	7 org	15.900.000	DAU		7 org	17.490.000
				15	Pelaksanaan Admisnitiasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	Jumlah dokumen	DPMD	6 dok	15.135.000	DAU		6 dok	16.648.500
				16	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	Jumlah sarana mobilitas yang di gunakan	DPMD	1 jenis	23.000.000	DAU		1 jenis	25.300.000
				17	Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	Jumlah dokumen	DPMD	3 dok	14.872.000	DAU		3 DOK	16.359.200
				18	Fasilitasi Organisasi ASN dan Non ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang Terfasilitasi	DPMD	2 Organisasi	20.000.000	DAU		2 Organisasi	33.000.000

				19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Tenaga Honor	DPMD	12 org	241.140.000	DAU		12 org	265.254.000
				20	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi	DPMD	5 item	5.000.000	DAU		5 item	5.000.000
				21	Pengelolaan arsip di lingkungan OPD	Jumlah Arsip yang di kelola	DPMD	6 Dok	7.435.000	DAU		6 Dok	7.435.000
				22									
					Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "BAIK"		100%				100%	
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	DPMD	5 unit	142.500.000	DAU		5 UNIT	259.600.000
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	DPMD	2 unit	85.150.000	DAU		3 Unit	93.665.000
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPMD	1 unit	30.000.000	DAU		1 unit	30.000.000
				4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala	DPMD	1 Halaman	97.500.000	DAU		1 Halaman	97.500.000

				Halaman Kantor	Halaman Kantor							
			5	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	DPMD	1 unit	127.500.000	DAU		1 unit	127.500.000
				Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMD	90%		DAU		95%	
			1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur	DPMD	17 ORG	290.430.500	DAU		17 ORG	319.473.550
				Program: Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 Tahun							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian	DPMD	2 set	9.000.000	DAU			
				Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB					BB	
			1	Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD	Jumlah dokumen	DPMD	2 dok	10.096.000	DAU		2 dok	10.096.000
			2	Penyusunan RKT dan PKT	Jumlah Dokumen	DPMD	4 dok	13.077.000	DAU		4 dok	13.077.000

			3	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	DPMD	20 DOK	11.540.000	DAU		20 DOK	11.540.000
			4	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	DPMD	20 DOK	8.303.000	DAU		20 DOK	8.303.000
					Jumlah Desa Mandiri	6 desa					13 desa	
					Persentasi Status Desa	100%					100%	
				Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Presentase Desa Tertib Adminitrasi Pengelolaan Keuangan Desa	95%					95%	
			1	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang mendapat Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	DPMD	278 Desa	165.834.000	DAU		278 Desa	182.417.400
			2	Monitoring dan evaluasi petunjuk teknis keuangan desa	Jumlah petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi	DPMD	5 perbub	75.010.000	DAU		5 perbub	75.010.000
			3	Monitoring, Evaluasi Pembinaan	Jumlah Desa yang di dampinggi penyusunan APBDes	DPMD	278 Desa	610.503.000	DAU		278 Desa	649.168.300

				Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang di asistensi APBDesnya		278 Desa				278 Desa	
					Jumlah Laporan Penyerapan dan Realisasi APBDes		278 Desa				278 Desa	
				Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Inovasi Desa yang di terapkan		2 inovasi				2 inovasi	
			1	Pembinaan dan Pengembangan TTG ,Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan TTG ,Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa	DPMD	60 Desa	197.298.000	DAU		84 Desa	220.000.000
			2	Pemutakhiran Data dan Validasi Data Profil Desa	Jumlah Pemutakhiran Data dan Validasi Data Profil Desa	DPMD	278 DESA	168.841.900	DAU		278 DESA	185.729.090
			3	Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang di Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	DPMD	278 DESA	253.927.000	DAU		278 DESA	501.229.300
			4	Penyelenggaraan Gelat Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok	DPMD	278 Desa	236.887.000	DAU		278 Desa	260.575.700
			5	Penyediaan Listrik Pedesaan	Jumlah desa	DPMD	3 desa	1.400.000.000	DAU		3 desa	1.400.000.000

		Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDes Sehat		25 Bumdes				25 Bumdes	
			% Desa yang memiliki Bumdes		60%				60%	
	1	Facilitas Pembentukan BUMDesa	Jumlah Bumdes yang terfasilitasi dalam pembentukannya	DPMD	50 DESA	200.000.000	DAU		78 DESA	200.000.000
	2	Pelatihan Menejemen BUMDes	Jumlah BUMDes yang mendapat pelatihan	DPMD	100 DESA	193.403.000	DAU		100 DESA	193.403.000
	3	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Usaha Yang Di Bina	DPMD	100 Desa	150.000.000	DAU		100 Desa	150.000.000
		Program : Peningkatan Pertisifasi Masyarakat dalam Membagun Desa	% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif		100%				100%	
	1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakto Gotong Royong	DPMD	278 desa	98.189.000	DAU		278 Desa	120.000.000
	2	Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	Jumlah desa yang mendapat evaluasi	DPMD	278 desa	291.763.000	DAU		278 desa	290.000.000
			Jumlah pendampingan desa yang akan di evaluasi	DPMD	23 desa				23 desa	
	3	Facilitasi Lembaga Adat Kab.Kapuas Hulu	Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	DPMD	59 org	452.336.000	DAU		59 Org	473.439.543

				4	Rakor KPMD	Jumlah peserta rakor	DPMD	278 org/desa	183.404.000	DAU		278 org/desa	165.000.000
				5	Pembinaan PKK	Jumlah Pkk desa yang dibina	DPMD	36 desa	117.496.000	DAU		36 Desa	117.496.000
				6	Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah Desa yang Paud dan Posyandu yang di bina	DPMD	36 Desa	132.504.000	DAU		36 Desa	132.504.000
					Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1206/PST	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1206/PST	DPMD	1 Desa	1.000.000.000	DAU		1 Desa	1.000.000.000
					Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI Kodim 1206/PSB	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI Kodim 1206/PSB	DPMD	1 Desa	300.000.000	DAU		1 Desa	300.000.000
					Fasilitasi Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI 644 Walet Sakti	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI 644 Walet Sakti	DPMD	1 Desa	200.000.000	DAU		1 Desa	200.000.000
					Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	% Desa Yang Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik		85%				85%	
				1	Pembinaan Adminitrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina Adminitrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	DPMD	278 DESA	256.250.000	DAU		278 DESA	260.000.000

				2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan Musrembangdes	DPMD	23 desa	196.660.000			23 Desa	246.603.500	
					Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa	556 org		556 org						
				3	Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta yang Mnegikuti Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	DPMD	278 Desa	231.675.000			278 Desa	250.000.000	
				4	Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang di bina peningkatan status kemandirian desa	DPMD	32 desa	444.700.000				4 Desa	400.000.000
				5	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Menyampaikan Laporan Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	DPMD	278 Desa	98.600.000				278 Desa	108.460.000
				6	Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah Desa yang di bina pelayanan publik	DPMD	278 desa	143.264.000				278 desa	157.590.400

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun rencana kerja (Renja) tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan tahun 2019. Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) berupa:

- a. Bagian alur tahapan penyusunan rencana kerja Satuan Perangkat Daerah.
- b. persiapan penyusunan Renja SKPD
- c. Penyusunan rancangan Renja SKPD

- d. pelaksanaan Format SKPD
- e. Penetapan Kerja SKPD

B. Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing – masing .yang pada hakekatnya mengembang tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi , dan fungsi alokasi. Pada dasarnya wujud Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Pendapatan Daerah :

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber pada :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan yang bersumber pada:
 - a. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapata Daerah yang sah yang bersumber pada :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan Sistem Perencanaan Nasional yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap perkembangan zaman.

Penyusunan Renja tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari rencana kerja DPMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai alat umpan balik (Feed back) yang dapat digunakan manajemen dalam rangka memberikan masukan / pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas dan penjabaran dari Visi dan Misi SKPD.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjuk melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, Oktober 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,


A. Am
Alpiansyah, S.E.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199503 1 002